

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Pattimura No. 02 Pekanbaru



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR **23** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 23

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja 2025 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renja Perangkat Daerah tahun sebelum dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

Penyusunan Renja 2025 ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian hasil penyusunan Renja ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan. Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690310199002 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	31
2.4. Review Terhadap RKPD	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	56
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	57
3.3. Program dan Kegiatan.....	60
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	76
BAB V. PENUTUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	11
2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023	27
2.3. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak (Kg)	32
2.4. Target dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan populasi dan Produksi Tahun 2023	34
2.5. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Riau (Tabel TC.31).....	39
2.7. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Tabel TC.32)	52
3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026	58
3.2. Rumusan Program Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tabel TC.33).....	62
4.1. Rencana Program/Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja SKPD	2
1.2. Alur Penyusunan Rancangan Renja SKPD	3
2.1. Produksi daging tahun 2020 – 2023	32
2.2. Grafik Produksi daging ruminansia dan unggas	32
2.3. Grafik Populasi daging ruminansia dan unggas	33

BAB I

PENDAHULUAN

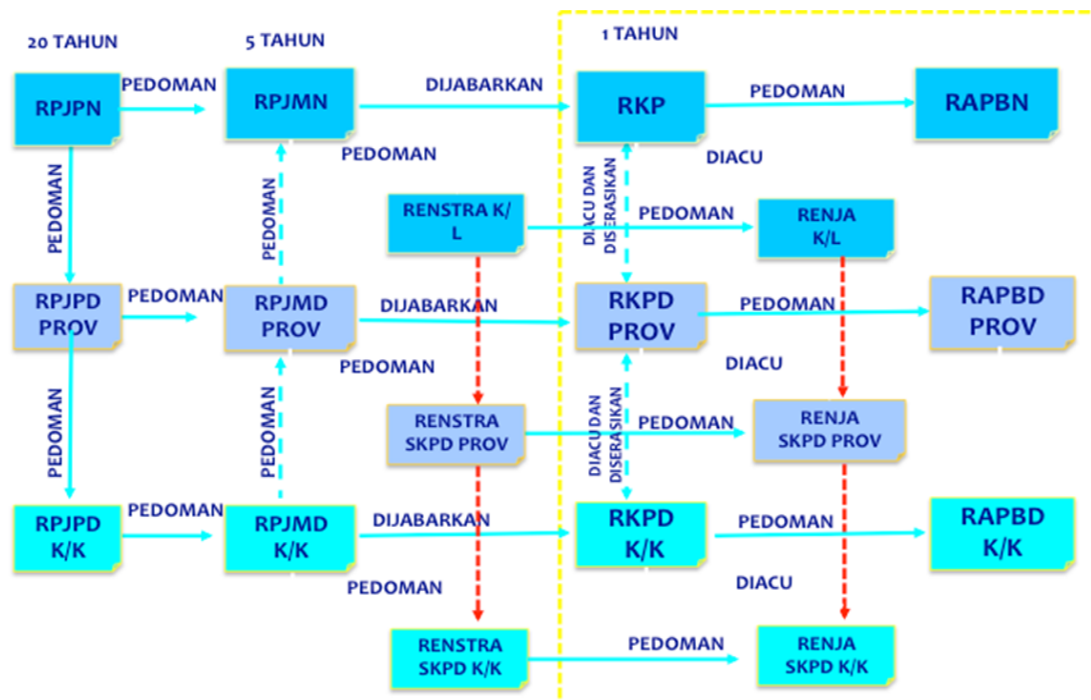
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yang bertujuan mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan tujuan pembangunan peternakan yaitu memperkuat peran sub sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatnya produksi daging serta terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Renja Perangkat Daerah juga bersinergi dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran,

program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam renstra K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Adapun gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

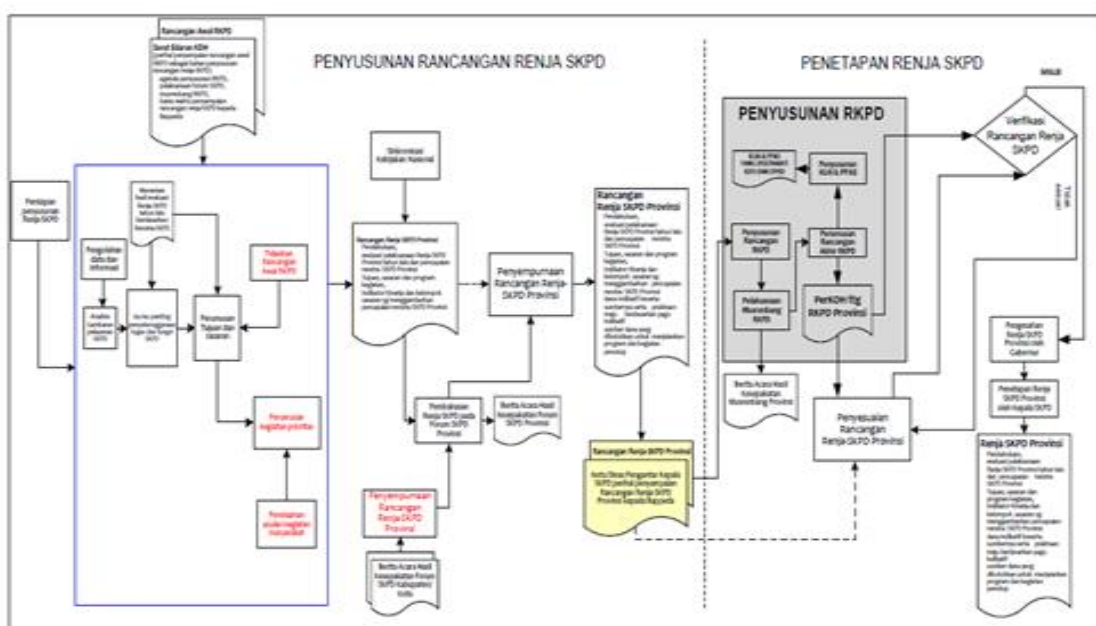


Gambar 1.1. Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat enam (6) Tahapan utama dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah yakni: persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap penyusunan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah,

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan Tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yaitu: Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah terlihat seperti gambar berikut ini:



Gambar 1.2. Alur Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

- 7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);

- 14) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
- 18) Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 74);
- 19) Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- 20) Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 21) Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
- 22) Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026;
- 23) Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan Perangkat Daerah dengan sasaran yang mengacu kepada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026 dan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, serta memuat usulan dari masyarakat yang tertuang didalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab ini memuat tingkat capaian kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dalam bab ini juga memuat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD serta formulasi isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan, usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Bab V Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan dan uraian tentang kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi Perangkat Daerah. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau **(Tabel T-C.29)**

Kodefikasi	Urusan/Bidang/ Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 - 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023				Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Pd s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU													
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	7,44	Persen	3,09	Persen	1,85	Persen	0,75	40,54	1,85	5,69	76,48
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	7	kelompok	2	kelompok	2	kelompok	2	100	2	6	85,71
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	8	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	100	1	8	100
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul	3.920	Ton	631	Ton	1.250	Ton	1.203	96,24	1.350	3.184	81,22
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	15	Laporan	8	Laporan	1	Laporan	1	100	4	13	86,67

3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran	13,2	Persen	10,52	Persen	13,1	Persen	10,37	79,16	13,2	34,09	258,26
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	37	Laporan	13	Laporan	12	Laporan	12	100	12	37	100
3.27.02.1.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	19	Laporan	7	Laporan	2	Laporan	2	100	1	10	52,63
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	3.504	ST (Satuan Ternak)	490	ST (Satuan Ternak)	513	ST (Satuan Ternak)	499	97,27	340	1.185	33,82
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.504	Ekor	490	Ekor	12.583	ekor	10.203	81,09	34.000	44.693	1.275,49
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	64	Persen	5	Persen	27	Persen	25,75	95,37	27	57,75	90,23
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	64	Persen	5	Persen	27	Persen	31,25	115,74	27	60	93,3
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	100	28	30	750
3.27.03.1.01.06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	3	Unit			1	Unit	1	100	29	30	1.000,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok yang membentuk korporasi	9	Persen	3	Persen	5	Persen	4	80	9	16	177,78
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	202	kelompok	20	kelompok	65	kelompok	65	100	77	107	52,97
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661	kelompok	576	kelompok	661	kelompok	661	100	661	1.898	287,14

3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang menerapkan sistem agribisnis (Kelompok)	60	kelompok	-	kelompok	25	kelompok	25	100	60	86	143,33
3.27.07.103.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	24	Laporan			12	Laporan	12	100		12	50
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Angka Kematian ternak.	2,2	Persen	3,1	Persen	2,5	Persen	2,2	1,12	2,2	7,64	347,27
		2. Persentase Peningkatan Unit Usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	40	Persen	30	Persen	10	Persen	14,28	142,8	10	54,28	135,7
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS	40	Persen	-15	Persen	10	Persen	37,39	373,9	10	32	80,98
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	144	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	36	100	36	108	75
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48	Laporan	-	Laporan	24	Laporan	24	100	24	48	100
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90	Persen	59	Persen	80	Persen	82,25	102,81	90	231	256,39
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	240	Laporan	60	Laporan	60	Laporan	60	100		120	50
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV	29	Unit	30	Unit	27	Unit	34	125,93	29	93	320,69

3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	179	Sertifikat	52	Sertifikat	25	Sertifikat	25	100	56	133	74,3
3.27.04.1.04.02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90	Orang	30	Orang	30	Orang	30	100	30	90	100
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	97,47	Persen	100	Persen	100	100	100	297,47	297,47
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	100	5	15	300
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.508	Orang Bulan	1.219	Orang Bulan	1.547	Orang Bulan	1.547	100	1.404	4.170	75,71
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	7	Laporan	-	Laporan	7	Laporan	7	100	7	14	200
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	1	100	1	2	100
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	Jenis Layanan	5	Jenis Layanan	5	Jenis Layanan	5	100	5	15	300
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	100	1	3	75
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	100	2	4	100
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	1	Paket	3	Paket	3	100	1	5	62,5
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	100	1	3	75
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	100	12	36	75

3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	14	Jenis	3	Jenis	4	Jenis	4	100	4	11	78,57
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	100	1	4	100
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	100	12	36	75
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Laporan	-	Laporan	4	Laporan	4	100	1	5	62,5
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	100	12	36	75
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	19	Jenis	4	Jenis	5	Jenis	5	100	3	12	63,16
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45	Unit	25	Unit	1	Unit	1	100	1	27	60
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	123	Unit	85	Unit	19	Unit	19	100	16	120	97,56
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	Unit	14	Unit	4	Unit	4	100	18	36	163,64
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1	Unit	1	Unit	1	100		2	66,67
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	-	Unit	3	Unit	3	100		3	150
UPT INSEMINASI BUATAN TERNAK													
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	7,44	Persen	3,09	Persen	1,85	Persen	0,75	40,54	1,85	5,69	76,48

3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI	171.000	Dosis	47.655	Dosis	42.000	Dosis	52.444	125	55.000	155.099	90,7
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	37	Laporan	12	Orang	12	Laporan	12	100	12	36	97,3
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Sapi Bull yang diadakan	16	Ekor	-	Ekor	6	Ekor	6	100	6	12	75
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	16	Ekor	-	Ekor	6	Ekor	6	100	6	12	75
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	64	Persen	5	Persen	27	Persen	25,75	95,37	27	57,75	90,23
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	74	Persen	62	Persen	70	Persen	74	105,71	74	210	283,78
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	12	Unit	3	Unit	5	unit	5	100	6	14	116,67
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	100	300	300
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3	Jenis Layanan	3	Jenis Layanan	2	Jenis Layanan	2	100		5	166,67
3.27.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	Paket	1	Paket	1	Paket	1	100	1	3	42,86
3.27.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3		1	Paket	1	Paket	1	100		2	66,67
3.27.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	1	100	1	3	300

3.27.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	100	12	36	100
UPT. LABORATORIUM VETERINER & KLINIK HEWAN													
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27	Persen	5	Persen	27	Persen	25,75	95,37	27	57,75	213,89
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	76	Persen	56	Persen	60	Persen	60	100	76	192	252,63
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3	unit	1	unit	5	unit	5	100	4	10	333,33
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kematian ternak	2,2	Persen	5,2	Persen	2,5	Persen	2,2	1,12	2,2	9,74	442,73
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS	10	Persen	10	Persen	10	Persen	37,39	373,9	10	57	573,9
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	37	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	100		24	64,86
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	70	Unit	30	Unit	20	Unit	32	160	25	87	124,29
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.000	Dokumen	324	Dokumen	260	Dokumen	298	114,62	270	892	89,2
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	96,67	Persen	100	Persen	100	100	100	296,67	296,67
3.27.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6	Jenis Layanan	2	Jenis Layanan	4	Jenis Layanan	4	100	3	9	150

3.27.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	-	Paket	1	Paket	1	100	1	2	66,67
3.27.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	100	1	3	75
3.27.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	100		2	50
3.27.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	-	Paket	1	Paket	1	100	1	2	100
3.27.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	10	Jenis Barang	-	Jenis Barang	2	Jenis Barang	2	100	3	5	50
3.27.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	-	Paket	1	Paket	1	100		1	50
3.27.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	-	Unit	8	Unit	7	87,5	103	110	5.500,00
3.27.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	9	Jenis	1	Jenis	2	Jenis	2	100	2	5	55,56
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan	-	Laporan	1	Laporan	1	100	1	2	66,67
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	100	12	36	75
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	84	Jenis	22	Jenis	1	Jenis	1	100	3	26	30,95
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	20	Unit	14	Unit	14	100	17	51	212,5
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN													
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	7,44	Persen	3,09	Persen	1,85	Persen	0,75	40,54	1,85	4,94	66,4

3.27.02.105	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	50	Ekor	-	Ekor	15	Ekor	-	-	20	20	40,32
3.27.02.105.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	86	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	24	100	12	60	69,77
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	64	Persen	5	Persen	27	Persen	25,75	95,37	27	57,75	90,23
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	63	Persen	56	Persen	60	Persen	60	100	63	179	284,13
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	7	unit	1	unit	5	unit	5	100	4	10	142,86
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	96,67	Persen	100	Persen	100	100	100	296,67	296,67
3.27.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6	Jenis Layanan	2	Jenis Layanan	3	Jenis Layanan	3	100	6	11	183,33
3.27.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	-	Paket	1	Paket	1	100	1	2	66,67
3.27.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	100	1	3	75
3.27.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	-	Paket	1	Paket	1	100	1	2	100
3.27.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6	Jenis Barang	-	Jenis Barang	1	Jenis Barang	1	100	1	2	33,33
3.27.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	-	Unit	25	Unit	25	100	5	30	1.000,00

3.27.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3	Jenis	1	Jenis	3	Jenis	3	100	3	7	233,33
3.27.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	-	Laporan	12	Laporan	12	100	12	24	100
3.27.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	-	Laporan	1	Laporan	1	100	1	2	100
3.27.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	100	12	36	75
3.27.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	38	Jenis	3	Jenis	2	Jenis	2	100	1	6	15,79
3.27.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	-	Unit	2	Unit	2	100	12	14	70
3.27.01.109.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	2	Unit	1	Unit	1	100		3	75

Pada tabel 2.1 terlihat program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, namun terdapat juga beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai target. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 memiliki 5 (lima) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Non Urusan dengan 6 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, kemudian 4 (empat) Program Urusan Pilihan Pertanian dengan 11 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan Program yang terdiri dari Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Program Non Urusan yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan hasil seluruh kegiatan pada program tersebut telah mencapai target. Sedangkan pada Program Urusan Pilihan Pertanian terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena bibit ternak yang ber SKLB tidak terealisasi yakni Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi. Untuk tahun 2023 tidak ada ternak yang berSKLB. Tidak tercapainya SKLB sebanyak 15 ekor disebabkan oleh kualitas induk ternak sapi yang sudah menurun karena faktor umur induk yang sudah tua sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai ternak yang berSKLB.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Dari 36 Sub Kegiatan sebagian besar realisasi kinerjanya telah mencapai target. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%);
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (100%).

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%).

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%);

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%);
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100%);
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (100%);
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100%);
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%).

**b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (100%).

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (100%).

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (100%).
- Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak (100%).

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (100%).
- Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan (100%).

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (100%).
- Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (100%).

Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi (100%).

Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan (100%).
- Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis (100%).

e. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (100%).

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

- Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (100%).

2.1.3. Realisasi Program /Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan yakni Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPT LVKH) target 260 Dokumen dengan realisasi sebanyak 298 Dokumen atau 114,62%.

2.1.4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Program/Kegiatan

Pada Program Urusan Pilihan Pertanian terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak mencapai target yakni Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 81,09%, karena penyediaan ternak sebanyak 12.583 ekor hanya terealisasi sebesar 10.203 ekor ternak. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat kelompok yang tidak melengkapi proposal dan administrasi saat pelaksanaan Validasi oleh Tim DPKH, sarana dan prasarana seperti lahan dan kandang tidak semua kelompok terpenuhi, menyebabkan ketidaksiapan kelompok saat ternak datang dan rasionalisasi pada kegiatan bahan kandang yang sudah tersampaikan kepada kelompok. Selain itu ternak sapi yang datang banyak mengalami tingkat kematian dilokasi kelompok ternak dan keterlambatan distribusi obat ternak

2.1.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Peningkatan populasi ternak didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program

Penyuluhan dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Pada Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdapat kegiatan yang tidak mencapai target yakni pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain berupa Pengadaan Ternak sebanyak 12.583 ekor hanya terealisasi sebesar 10.203 ekor. Hal ini tentu mempengaruhi capaian target populasi ternak sebagai target capaian program.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan, maka perlu diperhatikan dan diantisipasi melalui analisis resiko terhadap semua kegiatan dan perlu adanya pengendalian interen dalam pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan pada program dan kegiatan yang melebihi target maka untuk prestasi yang lebih baik lagi perlu dilakukan penambahan target kinerja. Tentunya penambahan target ini dibarengi dengan penambahan anggaran yang dapat mendukung target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah ditentukan di dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 (Tabel T-C.30)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan			101,75	102,35	103,50	104,20	99,76 (86,74%)	99,5 (97,21%)	95,39 (92,16%)	104,20	
2	Produksi Daging (Ton)			59.912	61.096	62.303	63.535	65.408 (109,17%)	77.730 (127,23%)	77.838 (124,93%)	63.535	
3	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)			95,90	96,60	97,30	98,0	94,10 (98%)	94,90 (98,24%)	97,20 (99,90%)	98,0	
4	Persentase Peningkatan produk hewan yang ASUH (%)			-	5	5	5	-	4,32 (86,40%)	4,48 (89,60%)	5	

Ket : * Angka Sementara

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa indikator Produksi Daging telah mencapai target bahkan melebihi target dan tiga indikator yang lain belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target yaitu pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan, Persentase Status Kesehatan Hewan dan Persentase Peningkatan Produk Hewan yang ASUH (%).

Tercapainya target produksi daging dengan persentase realisasi sebesar 124,93% menunjukkan bahwa Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan outcome yang baik terhadap peningkatan produksi daging. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan

peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Indikator persentase status kesehatan hewan tahun 2023 adalah sebesar 97,30% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90%. Capaian ini menunjukkan hasil penilaian pada kategori sangat tinggi namun belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target persentase status kesehatan hewan yaitu posisi Provinsi Riau yang strategis serta lalu lintas barang dan orang yang semakin ramai, sehingga rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik. Pada awal tahun 2022, Provinsi Riau dihadapi oleh wabah *Lumpy Skin Disease* (LSD) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 242/KPTS/PK.320/M/2022, tanggal 2 Maret 2022 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022, tanggal : 25 Juni 2022. Penyakit LSD dan PMK merupakan penyakit eksotik yang sebelumnya belum pernah ada atau sudah dibebaskan dari suatu wilayah. Penyakit ini mulai mewabah karena letak Provinsi Riau berbatasan langsung dengan negara luar khususnya Malaysia sehingga mempunyai resiko maupun peluang yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit eksotik ke Provinsi Riau.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular terutama pada saat terjadi wabah LSD dan PMK. Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara lain dengan penyusunan rancangan kebijakan, program dan anggaran di Bidang Kesehatan Hewan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan perundangan dan penegakan aturan-aturan di Bidang Kesehatan Hewan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek dan workshop, sosialisasi dan edukasi dalam rangka

meningkatkan *public awareness*, serta penyediaan sarana dan prasarana di Bidang Keswan dan Kesmavet.

Telah diterbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keswan dan Kesmavet melalui Peraturan Gubernur (Pergub) antara lain yaitu Pergub Rabies, Pergub Avian Influenza, Pergub Brucellosis, SK Gubernur tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis, dan Peraturan Kadis Peternakan tentang Unit Respon Cepat PHMS Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Pengawas Obat Hewan Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Riau, dan SK Gubernur tentang Otoritas Veteriner Provinsi Riau.

Selain itu, kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, Jembrana, SE, PMK, LSD, dan penyakit lainnya berfluktuasi tingkat kejadiannya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan ternak maupun hewan kesayangannya.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Jembrana, Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Antraks, Hog Cholera, Helminthiasis dan parasit darah yang telah dilaksanakan setiap tahun dan yang vaksinasi baru yang mulai dilaksanakan tahun 2022 adalah vaksinasi LSD dan Vaksinasi PMK sebagai akibat mewabahnya penyakit tersebut di Provinsi Riau. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak yang berasal dari wilayah endemi. Tahun 2023, walaupun penyakit LSD dan PMK tidak menjadi wabah lagi, namun upaya pengendaliannya tetap dilakukan dengan melaksanakan vaksinasi LSD dan PMK. Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan meliputi pengobatan serta vaksinasi pada

ternak besar (Jembrana dan SE). Sedangkan untuk vaksinasi LSD dan PMK dalam pelaksanaannya sudah diakomodir melalui dana APBN.

Indikator persentase produk hewan yang ASUH merupakan indikator kinerja Utama yang baru yang muncul setelah adanya Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Indikator ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Berdasarkan Tabel 2.2, diketahui bahwa persentase produk hewan yang ASUH pada tahun 2023 adalah sebesar 4,48% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 89,60% dari yang ditargetkan.

Pengawasan terhadap unit usaha penyedia produk hewan sangat penting, karena unit usaha merupakan titik awal penentuan kualitas produk hewan, maka penerapan praktik higiene sanitasi, penjaminan keamanan serta mutu produk harus dijalankan secara konsisten menurut aturan/standar operasional yang berlaku. Selanjutnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan pembinaan unit usaha melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. NKV sebagai border utama pengawasan praktik hygiene sanitasi dan keamanan produk hewan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam praktik nyata dilapangan khususnya unit usaha yang belum memiliki standar higiene sanitasi dan penjaminan keamanan pangan yang benar, maka akan menimbulkan dampak atau resiko buruk bagi mutu dan keamanan produk serta kesehatan manusia dan lingkungan. Selain permasalahan penerapan teknis produksi, faktor biaya produksi serta nilai jual produk akan memicu praktik penyimpangan prinsip-prinsip kesmavet.

Bentuk penyimpangan kesmavet dalam hal penerapan hygiene sanitasi dan keamanan pangan yang masih sering ditemukan yaitu proses penanganan karkas di Rumah Potong Hewan Ruminansia yang dilakukan di lantai atau melakukan pemotongan hewan tempat pemotongan hewan yang tidak resmi, penerapan kesejahteraan hewan terhadap ternak maupun

hewan non ternak yang terabaikan, proses pengangkutan produk hewan baik dalam bentuk segar dan beku yang tidak memperhatikan sistem rantai dingin dan ketentuan alat angkut, pencampuran daging sapi segar dengan daging kerbau beku, penjualan daging beku di pasar tradisional dengan tidak menggunakan sistem penyimpanan dingin, pengawasan terhadap produk olahan curah yang sulit dilakukan (keterangan masa kadaluarsa produk, jenis dan asal produk, sertifikasi halal dll), ketidak patuhan pemenuhan administrasi dan persyaratan teknis unit usaha dalam proses pemasukan/pengeluaran produk hewan dan kasus penyimpangan kesmavet lainnya.

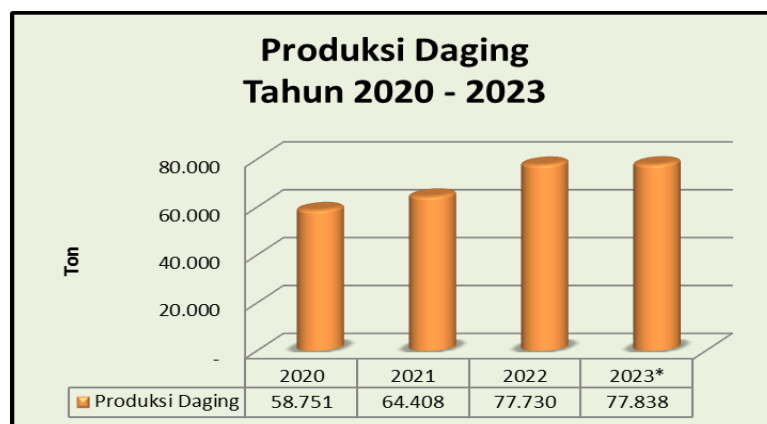
Upaya pemerintah provinsi dalam penjaminan hygiene sanitasi, keamanan dan mutu produk hewan di unit usaha adalah melalui sertifikasi kontrol veteriner/NKV, namun belum banyak unit usaha yang dapat melakukan pemenuhan persyaratan NKV. Pemenuhan kebutuhan produk hewan sebagian besar dipenuhi dari luar Provinsi Riau, sehingga usaha distributor produk hewan dan usaha ritel produk hewan semakin berkembang, sedangkan unit usaha di dalam daerah yang memproduksi produk hewan masih terbatas, terutama unit usaha Rumah Potong Hewan. Hingga saat ini seluruh RPH-R/RPH-U/RPH-B di Provinsi Riau belum bersertifikasi NKV. Hal ini yang menyebabkan masih rendahnya persentase Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH di Provinsi Riau.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah

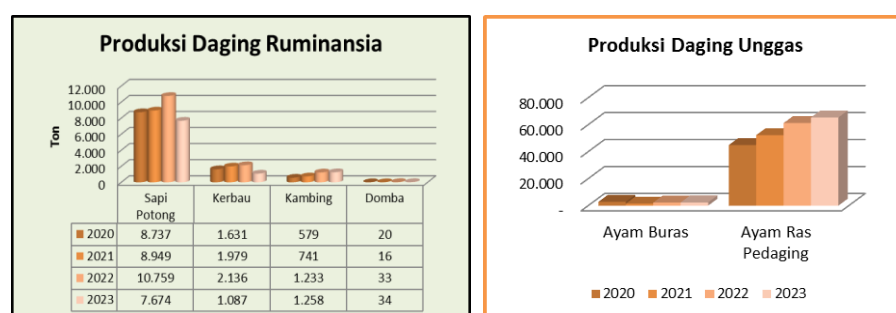
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat menjadi salah satu tumpuan dalam percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Riau. Pembangunan sub sektor peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki serta meningkatkan gizi masyarakat, juga merupakan sumber pendapatan masyarakat.

Capaian target produksi daging pada tahun 2023 sebesar 77.838.578 kg atau 77.838 ton (124,93%). Capaian kinerja ini sudah sangat bagus karena sudah melebihi target yang ditetapkan di Renstra.



Gambar 2.1. Produksi daging tahun 2020 - 2023

Adapun produksi daging ruminansia secara keseluruhan untuk ternak sapi, kerbau dan kambing dan domba dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2. Grafik Produksi daging ruminansia dan unggas

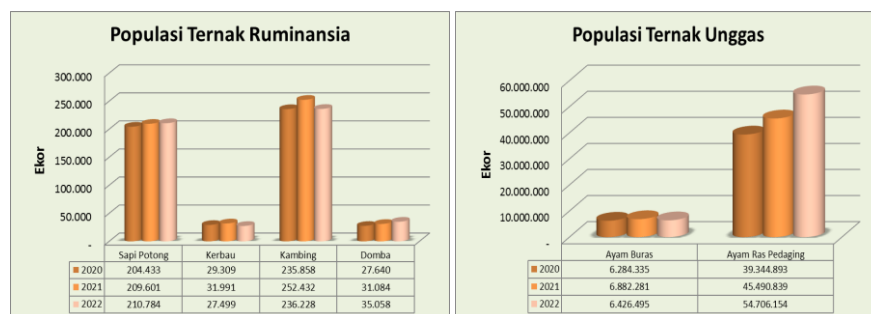
Tabel.2.3. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak (Kg)

Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023*
Sapi Potong	8.737.301	8.948.696	10.759.381	7.674.464
Kerbau	1.631.055	1.978.715	2.135.773	1.087.471
Kambing	578.579	741.404	1.232.929	1.257.600
Domba	19.879	15.583	33.332	34.000
Ayam Buras	2.869.213	1.481.144	2.353.334	2.400.000
Ayam Ras Pedaging	44.915.106	52.242.136	61.214.925	65.385.043
Jumlah	58.751.133	65.407.678	77.729.674	77.838.578

Dari Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa produksi daging Tahun 2023 di Riau sebanyak 77.838.578 Kg atau 77.839 Ton. Produksi daging tersebut berasal dari ternak ruminansia dan unggas baik ternak lokal maupun produksi daging dari pemotongan tenak yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Grafik Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas

Dari gambar 2.3 dapat dilihat grafik jumlah populasi cenderung meningkat sebagai hasil dari pelaksanaan optimalisasi reproduksi terutama melalui Inseminasi Buatan. Namun pada tahun 2022, populasi ternak mengalami sedikit penurunan terutama pada ternak kerbau dan kambing. Berdasarkan angka Tahun 2022, Populasi Sapi tahun 2021 dari 209.601 ekor meningkat menjadi 210.784 ekor pada tahun 2022. Populasi kerbau tahun 2021 sebanyak 31.991 ekor turun

menjadi 27.449 ekor pada tahun 2022. Populasi kambing tahun 2021 sebanyak 252.432 ekor menurun menjadi 236.228 ekor pada tahun 2022 dan populasi domba meningkat pada tahun 2022 menjadi 35.058 ekor dari sebelumnya 31.084 ekor. Pada ternak unggas, populasi ayam buras mengalami penurunan populasi dari 6.882.281 ekor pada tahun 2021 menjadi 6.426.495 ekor pada tahun 2022, sedangkan populasi ayam ras pedaging mengalami kenaikan dari 45.490.839 ekor pada tahun 2021 menjadi 54.706.154 ekor pada tahun 2022.

Pada tahun 2023 dalam upaya peningkatan populasi dan produksi daging ruminansia terutama sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka) sebanyak 27.675 ekor. Sampai dengan bulan Desember 2023 telah lahir sebanyak 21.951 ekor. Pelaksanaan IB tergantung dari kesiapan ternak (waktu birahi ternak) dan pelaksanaan IB tidak serentak sehingga yang sudah di IB sebagian masih bunting dan akan lahir pada tahun 2024.

Tabel 2.4. Target dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi dan Produksi tahun 2023

No	Kabupaten	Target Akseptor IB	Capaian Akseptor IB	%	Target Lahir IB dan KA	Capaian Lahir	%
1	Kuantan Singingi	6.160	5.914	96	4.546	4.763	105
2	Indragiri Hulu	6.500	5.531	85	4.797	3.599	75
3	Indragiri Hilir	900	515	57	664	508	77
4	Pelalawan	2.040	407	20	1.506	527	35
5	Siak	3.050	2.176	71	2.251	2.034	90
6	Kampar	6.950	5.290	76	5.129	4.580	89
7	Rokan Hulu	6.700	4.053	60	4.945	2.824	57
8	Rokan Hilir	1.300	497	38	959	255	27
9	Bengkalis	2.500	1.781	71	1.845	1.328	72
10	Kep Meranti	300	82	27	221	80	36
11	Pekanbaru	100	44	44	74	6	8
12	Kota Dumai	1.000	1.156	116	738	1.447	196
Jumlah		37.500	27.446	73	27.675	21.951	79%

Sumber Data : iSIKHNAS 2023, data diolah

Dari tabel 2.4. dapat dilihat bahwa target akseptor IB sebanyak 37.500 ekor. Dari target 37.500 ekor yang akan di IB, terealisasi IB nya sebanyak 27.446 ekor sapi dan ini tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Selama tahun 2023 ditargetkan akan lahir 27.675 ekor yang merupakan hasil dari Inseminasi Buatan dan Kawin alam. Target kelahiran ini merupakan target dari sebagian hasil IB tahun 2022 dan sebagian hasil IB tahun 2023. Hal ini karena sapi mempunyai masa bunting selama 9 bulan, jadi bukan berarti bahwa sapi yang lahir tahun 2023 merupakan hasil IB tahun 2023 saja melainkan juga hasil dari IB tahun 2022. Dari 27.675 ekor yang ditargetkan akan lahir, sampai dengan akhir Desember 2023 terealisasi sebanyak 21.951 ekor (79%), selebihnya ternak yang saat tahun 2023 bunting diperkirakan akan melahirkan pada tahun 2024.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Selama periode 2019-2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah mengupayakan secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Provinsi Riau, setelah dilakukan diidentifikasi permasalahan maka permasalahan dihadapi dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan produksi daging lambat	Pertambahan populasi ternak lambat	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Prasarana produksi peternakan belum memadai	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana
		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Ancaman kematian ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal
			Minimnya sarana prasarana Puskesmas
3	Belum semua produk Pangan Asal Hewan yang ASUH	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal	Pelaksanaan Audit/Surveillance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan masih terbatas
			Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
			Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan khususnya terhadap ternak peliharaan.
- b. Belum lengkapnya sarana prasarana Puskesmas di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- c. Produksi daging yang dihasilkan petani belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
- d. Para investor yang belum begitu berminat dalam berinvestasi pada sub sektor peternakan, mengingat jenis peternakan mengandung resiko tinggi (*high risk*) terutama kualitas hasil produksi yang masih rendah.

Peluang :

- a. Tersedianya SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), SDB (Sumber Daya Buatan) dalam pengembangan agribisnis peternakan;
- b. Peluang pasar ternak dan produk peternakan khususnya pasar antara pulau sangat terbuka.
- c. Tingkat konsumsi produk ternak terutama daging dan telur cukup tinggi dan cenderung sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan penduduk;
- d. Kebijakan swasembada daging baik tingkat provinsi maupun nasional;
- e. Melemahnya potensi pasokan dari beberapa wilayah sentra produksi ternak nasional sementara konsumsi pada tingkat nasional terus mengalami peningkatan,

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program.

Dari isu-isu penting tersebut di atas selanjutnya diformulasi dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan populasi ternak
- b. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan
- c. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak
- d. Membangun kemitraan antar stekholder dalam mengembangkan komoditas unggulan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
- e. Meningkatnya penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal di masyarakat.

2.4. Review Terhadap RKPD

Review terhadap RKPD merupakan proses membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan peternakan. Analisis kebutuhan diperoleh dengan cara menguraikan semua hasil usulan yang disampaikan melalui tahapan Pertemuan Forum PD dan Rapat Koordinasi Teknis yang telah dilaksanakan antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Kota yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat fisik (utama) pembangunan peternakan. Adapun kesesuaian antara RKPD dengan kebutuhan yaitu program dan kegiatan yang tertuang didalam Renja PD memuat dari berbagai usulan kegiatan rutin dinas yang menjadi urusan tupoksi dinas teknis dan usulan dari Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten dan Kota.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka ada beberapa kegiatan dan Sub pada RKPD dan Renja yang mengalami perubahan karena kegiatan/sub kegiatan tersebut tidak ada lagi di Kepmendagri tersebut. Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengalami perubahan kemudian di RKPD dan di Renja disesuaikan, begitu juga dengan indikator dan tergetnya (Tabel 2.6).

Tabel 2.6. Review terhadap RKPD Tahun 2025 Provinsi Riau (Tabel T.C. 31)

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					59.194.042.073	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					65.507.254.658
						43.974.980.771						46.079.732.794
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	3	Persen	6.700.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	3	Persen	6.479.823.760
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	4	Kelompok	150.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	2	Kelompok	150.000.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kuansing & Kampar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1	Laporan	150.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kuansing & Kampar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1	Laporan	150.000.000
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul	5.904	Ton	600.000.000	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul	3.150	Ton	600.000.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1	Laporan	600.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1	Laporan	600.000.000

	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Angka kelahiran	13	Persen	1.950.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Angka kelahiran	13,30	Persen	1.950.000.000
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak		Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3	Laporan	150.000.000	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak		Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3	Laporan	150.000.000
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1	Laporan	1.800.000.000	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1	Laporan	1.800.000.000
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	170	ST	4.000.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	182	ST	3.779.823.760
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	7.100	Ekor	4.000.000.000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.132	Ekor	3.779.823.760
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan		Persen	1.700.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12	Persen	1.652.843.208
	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana		Persen	1.700.000.000	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	20	Persen	1.652.843.208
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kampar	Luas Kawasan Pertanian yang Termanfaatkan	900	Ha	250.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kampar	Luas Kawasan Pertanian yang Termanfaatkan	900	Ha	249.940.104
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Kampar & Meranti	Jumlah Prasarana Pascapanen Peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5	Unit	1.000.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Kampar & Meranti	Jumlah Prasarana Pascapanen Peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	6	Unit	1.000.000.000

	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rokan Hilir	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1	Unit	450.000.000	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rokan Hilir	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1	Unit	450.000.000
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1. Persentase Angka Kematian ternak.	2,15	Persen	4.730.471.890	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		- Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk	10	Persen	5.250.591.960
			2. Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan penjaminan hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk	10	Persen	500.000.000			- Persentase Angka Kematian ternak.	2,15	Persen	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS	10	Persen	4.030.471.890	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS	10	Persen	3.874.127.880
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Wilayah yang Dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan	12	Wilayah	230.471.890	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Wilayah yang Dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan	12	Wilayah	230.471.640
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36	Laporan	3.800.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36	Laporan	3.643.656.240
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90	Persen	800.000.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90	Persen	976.516.000
	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	1	Laporan	100.000.000	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	1	Laporan	99.996.000

	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kuansing, Inhil, Kampar, Rohul & Rohil	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM	60	Laporan	700.000.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kuansing, Inhil, Kampar, Rohul & Rohil	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM	60	Laporan	876.520.000
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar	14	Wilayah	400.000.000	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar	14	Wilayah	399.948.080
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	35	Laporan	250.000.000	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	35	Laporan	249.966.312
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran terhadap Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	100	Orang	150.000.000	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran terhadap Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	112	Orang	149.981.768
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok yang membentuk korporasi	15	Persen	2.670.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok yang membentuk korporasi	15	Persen	2.669.998.720
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	50	Kelompok	2.000.000.000	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	50	Kelompok	2.089.493.400
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661	Kelompok	2.000.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661	Kelompok	2.089.493.400
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok yang menerapkan system agribisnis	60	Kelompok	670.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok yang menerapkan system agribisnis	60	Kelompok	580.505.320

	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kuansing	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	1	Laporan	670.000.000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kuansing	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	2	Unit	580.505.320
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	27.674.508.881	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	30.026.475.146
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen	150.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen	149.989.569
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	149.989.569
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5	Laporan	20.780.052.127	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5	Laporan	23.132.311.767
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.440	Orang/ Bulan	20.780.052.127	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.440	Orang/ Bulan	23.132.311.767
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	7	laporan	250.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	7	laporan	249.975.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	250.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	249.975.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6	Jenis Layanan	1.439.456.754	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6	Jenis Layanan	1.439.362.746
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	99.999.499
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	329.456.754	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	329.456.594

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	199.933.700
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	160.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	159.999.953
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kab/Kota dan Pusat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	650.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kab/Kota dan Pusat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	649.973.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	6	Jenis	3.905.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	4	Jenis	3.904.991.064
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4.992.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.099.999.064
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	100.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.700.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.700.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	6	Jenis	1.150.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	6	Jenis	1.149.845.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	49.930.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Unit	750.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	749.915.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000
UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK						4.027.000.000						4.026.958.768
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi		Persen	2.700.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi	3	Persen	2.699.964.252
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Semen Beku yang Memenuhi SNI	62.000	Dosis	2.300.000.000	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Semen Beku yang Memenuhi SNI	62.000	Dosis	2.299.998.250
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kota Pekanbaru	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12	Laporan	2.300.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kota Pekanbaru	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12	Laporan	2.299.998.250

	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Sapi Bull yang diadakan	6	Ekor	400.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Sapi Bull yang diadakan	6	Ekor	399.966.002
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kota Pekanbaru	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6	Ekor	400.000.000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kota Pekanbaru	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6	Ekor	399.966.002
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12	Persen	1.000.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12	Persen	999.999.500
	Penataan Prasarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	76	Persen	1.000.000.000	Penataan Prasarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	76	Persen	999.999.500
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4	Unit	1.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5	Unit	999.999.500
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	327.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	326.995.016
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1	Jenis Layanan	27.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1	Jenis Layanan	27.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	27.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	27.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	1	Jenis	300.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	1	Jenis	299.995.016
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	299.995.016

UPT. LABORATORIUM VETERINER & KLINIK HEWAN						6.367.007.520						6.366.809.290
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12	Persen	790.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12	Persen	350.000.000
	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	78	Persen	790.000.000	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	78	Persen	350.000.000
	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Kota Pekanbaru	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	2	Unit	190.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Kota Pekanbaru	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1	Unit	200.000.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3	Unit	600.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		- Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan penjaminan hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk - Persentase Angka Kematian ternak.	10 2,15	Persen Persen	3.400.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		- Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan penjaminan hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk - Persentase Angka Kematian ternak.	10 2,15	Persen Persen	3.400.000.000
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS	10	Persen	2.000.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS	10	Persen	2.000.000.000
	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Kota Pekanbaru	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12	Laporan	2.000.000.000	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Kota Pekanbaru	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12	Laporan	2.000.000.000

	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	14	unit	1.400.000.000	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	14	unit	1.400.000.000
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Pekanbaru	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	300	Dokumen	1.400.000.000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Pekanbaru	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	300	Dokumen	1.400.000.000
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	2.177.007.520	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	2.616.809.290
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3	Jenis Layanan	346.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3	Jenis Layanan	678.748.586
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	592.929.086
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	29.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	68.828.000
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1	Paket	17.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1	Paket	16.991.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)	3	Jenis Barang	1.050.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)	3	Jenis Barang	1.084.597.270
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	600.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	393.280.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	100.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	100.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	350.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	591.317.270

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	2	Jenis	461.007.520	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	2	Jenis	469.411.859
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	34.990.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	411.007.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	434.421.859
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	3	Jenis	320.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	3	Jenis	384.051.575
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	14.950.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	200.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25	Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	169.101.575
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN						4.825.053.782						9.033.753.806
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	3	Persen	1.700.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	3	Persen	4.518.748.210

	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	20	Ekor	1.700.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	20	Ekor	4.518.748.210
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kampar	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	12	Laporan	1.700.000.000	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kampar	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	12	Laporan	4.518.748.210
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12	Persen	2.000.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12	Persen	3.390.000.000
	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	65	Persen	2.000.000.000	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	65	Persen	3.390.000.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab. Kampar	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	20	Unit	2.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab. Kampar	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	12	Unit	3.390.000.000
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	1.125.053.782	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	1.125.005.596
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3	Jenis Layanan	317.843.782	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3	Jenis Layanan	317.817.244
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	99.988.944
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	50.000.000

	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	167.843.782	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	167.828.300
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1	Jenis Barang	180.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1	Jenis Barang	195.600.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	180.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	195.600.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3	Jenis	526.810.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3	Jenis	511.588.352
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	48.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	28.810.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	28.790.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	434.798.352
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1	Jenis	100.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1	Jenis	100.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	Unit	100.000.000

Dari hasil review, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator, target kinerja dan pagu anggaran Hasil Analisis Kebutuhan ada perbedaan dengan RKPD. Pagu pada RKPD sebesar Rp. 59.194.042.073,- sedangkan pagu pada Hasil Analisis Kebutuhan adalah Rp. 65.507.254.658,-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025, disamping berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026, juga mempertimbangkan hasil dari Forum Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 serta berdasarkan Surat Edaran Gubernur Riau tentang Penetapan Pagu Indikatif masing-masing Perangkat Daerah. Program Kegiatan dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan kabupaten/kota se Provinsi Riau dari hasil dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
(Tabel T-C.32)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	3 Persen	
1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	2 Kelompok	
	a Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kuansing & Kampar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Lap	(Penetapan Standar Daerah/SNI untuk ternak Asli Riau yaitu Sapi Kuantan dan Kerbau Kuntu)
2	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	3.150 Ton	

	a Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	
3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Angka kelahiran (Persen)	13.30 Persen	
	a Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3 Laporan	<i>Akseptor : 38.800 Ekor N2 Cair : 33.700 Liter Semen Beku Bali : 15.000 Dosis Pelayanan Kelahiran : 15.250 Ekor Operasional Kebuntingan : 11.500 Sinkronisasi Birahi : 1.500 EkorEkor</i>
	b Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	
4	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	182 ST	
	a Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.132 Ekor	
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	12 Persen	
1	Penataan Prasarana Pertanian		Pesentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	20 Persen	
	a Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kampar	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	900 Ha	
	b Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kuansing, Inhu, Pelalawan, Kampar & Meranti	Jumlah prasarana pascapanen Peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	6 Unit	<i>Instalasi Limbah : 6 Unit</i>
	c Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rokan Hilir	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1 Unit	

III	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		- Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan penjaminan hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk - Persentase Angka Kematian ternak.	10 Persen 2.15 Persen	
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	
	a Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	Yandu : 40.000 ekor Gangrep : 1.000 ekor Vaksinasi Rabies : 25.000 ekor Vaksin Jembrana : 10.000 ekor Vaksin SE : 10.000 ekor
	b Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	Jasa Surveilans : 2.000 Ekor
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	90 Persen	
	a Pengawasan Peredaran Produk Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	Pengawasan 12 Kab/Kota Pengambilan sampel di 15 unit usaha RPH: Pku (1), Kampar (1), Dumai (1), Rohul (1), Inhu (1) Unit usaha Budidaya ayam petelur/ pengepul telur: Meranti (1), Kampar (1), Pekanbaru (2) Distributor daging ayam : Rohul (1), Pekanbaru (4)
	b Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kuansing, Inhil, Kampar, Rohul & Rohil	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	60 Laporan	(Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi)
3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada penyediaan produk pangan asal hewan segar	14 Wilayah	

	a	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	35 Laporan	(Jumlah Unit Usaha akan disertifikasi dan di surveillance) Pembinaan NKV (46) Sertifikasi NKV (5) Surveillans NKKV (60) RMRPH (5)
	b	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	112 Orang	Sosialisasi Kader Siaga Rabies (Kasira) 12 Kab/Kota di Provinsi Riau (112 Orang) TOT Kader Siaga Rabies dengan mengundang 3 kabupaten sebagai percontohan yaitu kab kampar, pekanbaru dan dumai KIE Rabies dalam rangka WRD (50 siswa SD)
IV		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok yang membentuk korporasi (Persen)	15 Persen	
1		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)	50 Kelompok	
	a	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661 Kelompok	(Jumlah Kelompok yang Dibina oleh Petugas Pendamping) Jumlah Pendamping : 77 Orang Jumlah Kelp yang Dibina : 661 Kelp Jumlah Kelp yang Naik Kelas : 50 Kelp
2		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis (Kelompok)	60 Kelompok	
	a	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kuansing	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	Jumlah Korporasi Dibentuk : 2 Kelompok yang Menerapkan Sistem Agribisnis : 60 Kelp

Dari hasil Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dilihat bahwa usulan program kegiatan kabupaten/kota sejalan dengan program kegiatan yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kementerian Pertanian (RKP) 2025 bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan arah kebijakan 1) penghapusan kemiskinan ekstrim, 2) penurunan stunting, 3) pengendalian inflasi dan 4) penguatan daya saing dan mendorong investasi.

Isu Strategis yang diangkat dalam pengembangan peternakan yaitu Krisis pangan dan Perubahan Iklim-Elnino, Defisit Produksi Daging Sapi dan Susu, *Emerging* dan *Re emerging Disease*, Rendahnya Daya Saing Produk Peternakan dan Hilirisasi surplus produksi daging ayam dan Telur, maka Ditjen PKH menetapkan 3 (tiga) strategi, sebagai berikut:

1. Fokus Komoditas dan Lokasi.
2. Pengembangan Kawasan/Closed Loop/ Korporasi Peternakan
3. Penguatan Daya saing

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 266/KPTS/OT.050/M/06/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Tim Percepatan penyediaan Daging, Susu dan Telur Tahun Anggaran 2024, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta menurunkan angka *stunting*, diperlukan program/kegiatan percepatan penyediaan daging, susu dan telur guna memenuhi ketersediaan protein hewani secara merata bagi masyarakat. Percepatan penyediaan daging, susu dan telur dilakukan melalui program/kegiatan pengembangan : a) sapi perah, kambing perah dan susu; b) ayam ras pedaging dan telur konsumsi dan; c) sapi potong, kerbau potong, kambing potong dan domba potong.

Program/Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian 2025 bidang Peternakan dan Keswan berupa :

1. Pengembangan Ternak (Ruminansia Potong, Perah, Unggas dan Aneka Ternak).
2. Optimalisasi Reproduksi.
3. Benih/Bibit Ternak Unggul, Sarpras.

4. Pengembangan Padang Penggembalaan, Kebun Sumber Benih, Integrasi Sawit,
5. Laboratorium Pakan, Pengawasan & Pengujian Mutu dan Bahan Pakan.
6. Pengendalian & Penanganan Penyakit Hewan.
7. Sertifikasi Unit Usaha, Mutu dan Keamanan Produk Hewan, Sarana Kesmavet.
8. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

Bila ditelaah RKP Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 dengan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 terdapat keselarasan antara program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dengan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan *sharing* kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan dalam mencapai tujuan Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Inklusif dengan sasaran Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan tujuan dan sasaran dinas sebagai berikut :

a. Tujuan

Dalam periode 2025 – 2026 Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah “ **Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**”.

Indikator Tujuan : Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sub Sektor Peternakan.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yaitu rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha pertanian dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha pertanian. NTUP di atas 100 menunjukkan

petani surplus, sama dengan 100 berarti impas dan di bawah 100 berarti petani rugi/defisit.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya produksi daging, dengan indikator : Produksi daging
- 2) Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator :
 - Persentase status kesehatan hewan
 - Persentase peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun	
			2025	2026
Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		NTUP Sub Sektor Peternakan	101,47	101,75
	Meningkatnya produksi daging	Produksi daging (Ton)	84.768	87.311
	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)	98,1	98,2
		Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5	5

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan. Untuk mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan pembangunan peternakan dengan Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dengan indikator NTUP Sub Sektor Peternakan. Sedangkan Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah meningkatnya produksi daging, dan Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Peningkatan produksi daging dicapai dengan upaya menambah jumlah populasi ternak, meningkatkan kapasitas SDM bidang peternakan dan meningkatkan skala usaha peternakan. Peningkatan populasi pada ruminansia dilakukan dengan strategi meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan, meningkatkan keberhasilan kawin alam, meningkatkan jumlah dan kualitas bibit ternak dan pemenuhan pakan ternak. Sedangkan upaya untuk meningkatkan skala usaha peternakan adalah dengan peningkatan fasilitasi permodalan kelompok usaha peternakan dan peningkatan usaha agribisnis peternakan melalui pemanfaatan limbah ternak dan pengembangan sentra komoditas peternakan.

Usaha peningkatan produksi ternak harus diikuti dengan penanganan dan pengendalian penyebaran penyakit pada ternak. Upaya untuk pengendalian penyakit tersebut dilakukan dengan pemantauan penyakit hewan dan peningkatan pelayanan veteriner melalui pengembangan sarana dan prasarana UPT. RSH, pelayanan dan pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta dengan penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi.

Pengendalian juga dilakukan pada sektor hilir hingga pengolahan dan pemasaran pangan asal ternak ini. Untuk itu akan didorong para pelaku usaha produk peternak untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan produk pangan asal ternak sehingga aman, sehat utuh dan halal (ASUH).

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses perencanaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Agar tujuan Gubernur dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat terutama peningkatan pendapatan peternak. Pengembangan peternakan di Provinsi Riau terutama ternak ruminansia ditinjau dari aspek sumberdaya lahan disarankan dengan pola pengembangan intensifikasi dan keterpaduan.

Pola intensifikasi dan keterpaduan tidak memerlukan lahan tersendiri yang khusus untuk pengembangan peternakan, namun dapat diintegrasikan dengan usaha lainnya, sehingga sangat tergantung pada penggunaan lahannya. Pada pola ini, pemeliharaan ternak tidak terlalu terpaku pada keberadaan lahan kosong. Keberadaan wilayah pengembangan peternakan terdapat di sentra-sentra pengembangan perkebunan dan tanaman pangan. Di wilayah perkebunan, keberadaan lahan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai tempat penanaman rumput pakan ternak sebagai tanaman sela dan pemanfaatan limbah agroindustry. Sedangkan di wilayah pengembangan tanaman pangan, limbah hasil pertanian merupakan penyedia hijauan pakan.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berperan untuk dapat memenuhi kebutuhan

pangan terutama pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan seperti daging, telur dan susu. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan terhadap daging dan hasil ternak lainnya. Pemenuhan kebutuhan daging ruminansia di Provinsi Riau dari produksi lokal hanya sebesar 24%, selebihnya dipenuhi dari ternak yang didatangkan dari luar provinsi dan daging beku. Kondisi ini menggambarkan masih terjadi kekurangan pasokan daging dan sekaligus menjadi peluang bagi pengembangan ternak di Provinsi Riau.

Dalam upaya untuk meningkatkan produksi daging, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Peternakan telah melaksanakan beberapa Program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan populasi ternak terutama sapi, kerbau dan kambing.

Untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim, Dinas Peternakan juga merencanakan pengadaan ternak unggas yang akan didistribusikan ke kelompok-kelompok peternak dengan prioritas pada kabupaten yang tinggi kemiskinan ekstrimnya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025 sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Adapun program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau tahun 2025 sebagai berikut:

No	Nama Program	Pagu Anggaran
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.698.536.222
2.	Program Penyuluhan Pertanian	2.669.998.720
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.392.842.708
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	8.650.591.960
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	34.095.285.048
	Jumlah	65.507.254.658

Penjabaran rincian rencana kegiatan dan sub kegiatan tiap program pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel. 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tabel. T-C.33)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					65.507.254.658,00				59.971.889.767,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				46.079.732.794,00				45.202.595.855,00
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				46.079.732.794,00				45.202.595.855,00
1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		100 Persen	30.026.475.146,00			100 Persen	28.124.076.776,00
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Dokumen	149.989.569,00			12 Dokumen	150.000.000,00
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	149.989.569,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	150.000.000,00
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		5 Laporan	23.132.311.767,00			5 Laporan	21.329.620.022,00
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1440 Orang/ Bulan	23.132.311.767,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.500 Orang/ Bulan	21.329.620.022,00
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola		7 Laporan	249.975.000,00			7 Laporan	250.000.000,00

3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	249.975.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	250.000.000,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>		6 Jenis Layanan	1.439.362.746,00			6 Jenis Layanan	1.439.456.754,00
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	99.999.499,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	100.000.000,00
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	329.456.594,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	329.456.754,00
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	199.933.700,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD))		5 Paket	200.000.000,00
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	159.999.953,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	160.000.000,00
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	649.973.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	650.000.000,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>		4 Jenis	3.904.991.064,00			4 Jenis	3.905.000.000,00
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.992.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	5.000.000,00
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.099.999.064,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Laporan	1.100.000.000,00
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	100.000.000,00

	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.700.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48 Laporan	2.700.000.000,00
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>		6 Jenis	1.149.845.000,00			6 Jenis	1.050.000.000,00
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	49.930.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	50.000.000,00
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Unit	749.915.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 Unit	750.000.000,00
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit	50.000.000,00
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	100.000.000,00
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31 Unit	100.000.000,00
2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>		3 Persen	6.479.823.760,00			3 Persen	7.905.000.000,00
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)</i>		2 Kelompok	150.000.000,00			4 Kelompok	125.000.000,00
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	<i>Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan</i>	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, (Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa)	1 Laporan	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	125.000.000,00

	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah produksi pakan unggul (Ton)</i>		3150 Ton	600.000.000,00			7.492 Ton	600.000.000,00
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	600.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 laporan	600.000.000,00
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Angka kelahiran (Persen)</i>		13.30 Persen	1.950.000.000,00			13.40 Persen	1.950.000.000,00
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	150.000.000,00
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	1.800.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 laporan	1.800.000.000,00
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	<i>Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)</i>		182 ST	3.779.823.760,00			166 ST	5.230.000.000,00
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.132 Ekor	3.779.823.760,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5116 Ekor	5.230.000.000,00
3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>		12 Persen	1.652.843.208,00			12 Persen	1.500.000.000,00
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)</i>		20 Persen	1.652.843.208,00			22 Persen	1.500.000.000,00
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	<i>Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan</i>	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, (Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa)	900 Ha	249.940.104,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		900 Ha	250.000.000,00

	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	<i>Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, Kab. Kepulauan Meranti (Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa)	6 Unit	952.903.104,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	800.000.000,00
	3.27.03.1.01.0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	<i>Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan</i>	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	450.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	450.000.000,00
4,	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- <i>Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan</i> - <i>Persentase Angka Kematian Ternak</i>		10 Persen 2,15 Persen	5.250.591.960,00			10 Persen 2,1 Persen	5.003.519.079,00
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)</i>		10 Persen	3.874.127.880,00			10 Persen	3.753.519.079,00
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	<i>Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Wilayah	230.471.640,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Wilayah	253.519.079,00
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	3.643.656.240,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36 Laporan	3.500.000.000,00
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	<i>Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)</i>		90 Persen	976.516.000,00			90 Persen	800.000.000,00
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	<i>Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	99.996.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	100.000.000,00
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	<i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>	Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, (Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa)	60 Laporan	876.520.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Laporan	700.000.000,00

	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<i>Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada penyediaan produk pangan asal hewan segar</i>		14 Wilayah	399.948.080,00			15 Wilayah	450.000.000,00
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	<i>Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Laporan	249.966.312,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39 Laporan	300.000.000,00
	3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<i>Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Orang	149.981.768,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	150.000.000,00
5,	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi</i>		15 Persen	2.669.998.720,00			15 Persen	2.670.000.000,00
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)</i>		50 Kelompok	2.089.493.400,00			50 Kelompo k	2.000.000.000,00
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661 Kelompok	2.089.493.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		661 Kelompok	2.000.000.000,00
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	<i>Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis</i>		60 Kelompok	580.505.320,00			60 Kelompo k	670.000.000,00
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, (Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa)	2 Unit	580.505.320,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	670.000.000,00
	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK					4.026.958.768,00				4.027.000.000,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.026.958.768,00				4.027.000.000,00
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.026.958.768,00				4.027.000.000,00

1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>		100 Persen	326.995.016,00			100 Persen	327.000.000,00
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>		1 Jenis Layanan	27.000.000,00			6 Jenis Layanan	27.000.000,00
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	27.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	27.000.000,00
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>		1 Jenis	299.995.016,00			4 Jenis	300.000.000,00
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	299.995.016,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48 Laporan	300.000.000,00
2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>		3 Persen	2.699.964.252,00			3 Persen	2.700.000.000,00
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI</i>		62000 Dosis	2.299.998.250,00			7.492 Ton	2.300.000.000,00
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	2.299.998.250,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 laporan	2.300.000.000,00
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	<i>Jumlah Sapi Bull yang diadakan</i>		6 Ekor	399.966.002,00			166 ST	400.000.000,00
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Ekor	399.966.002,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5116 Ekor	400.000.000,00

3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>		12 Persen	999.999.500,00			12 Persen	1.000.000.000,00
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)</i>		76 Persen	999.999.500,00			22 Persen	1.000.000.000,00
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	999.999.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19 Unit	1.000.000.000,00
UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN						6.366.809.290,00				6.357.007.520,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.366.809.290,00				6.357.007.520,00
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.366.809.290,00				6.357.007.520,00
1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>		100 Persen	2.616.809.290,00			100 Persen	2.167.007.520,00
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>		3 Jenis Layanan	678.748.586,00			6 Jenis Layanan	346.000.000,00
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	592.929.086,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	300.000.000,00
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	68.828.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	29.000.000,00
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	16.991.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	17.000.000,00
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>		3 Jenis Barang	1.084.597.270,00			3 Jenis Barang	1.000.000.000,00

	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	393.280.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22 Unit	600.000.000,00
	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	100.000.000,00
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	591.317.270,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	300.000.000,00
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>		2 Jenis	469.411.859,00			4 Jenis	461.007.520,00
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	34.990.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	50.000.000,00
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	434.421.859,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48 Laporan	411.007.520,00
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>		3 Jenis	384.051.575,00			6 Jenis	360.000.000,00
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	14.950.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit	35.000.000,00
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	200.000.000,00
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	169.101.575,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31 Unit	125.000.000,00
2,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>		12 Persen	350.000.000,00			12 Persen	790.000.000,00

	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana UPT</i>		78 Persen	350.000.000,00			22 Persen	790.000.000,00
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	<i>Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	190.000.000,00
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19 Unit	600.000.000,00
3,	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- <i>Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan</i> - <i>Persentase Angka Kematian Ternak</i>		10 Persen 2,15 Persen	3.400.000.000,00			10 Persen 2,1 Persen	3.400.000.000,00
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)</i>		10 Persen	2.000.000.000,00			10 Persen	2.000.000.000,00
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.000.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	2.000.000.000,00
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<i>Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Keswan Kesmavet</i>		30 Unit	1.400.000.000,00			15 Wilayah	1.400.000.000,00
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Dokumen	1.400.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		330 Dokumen	1.400.000.000,00
		UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN				9.033.753.806,00				4.385.286.392,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.033.753.806,00				4.385.286.392,00
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				9.033.753.806,00				4.385.286.392,00

1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		100 Persen	1.125.005.596,00			100 Persen	1.185.286.392,00
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>		3 Jenis Layanan	317.817.244,00			6 Jenis Layanan	345.595.392,00
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	99.988.944,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	110.000.000,00
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	50.000.000,00
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	167.828.300,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	185.595.392,00
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>		1 Jenis Barang	195.600.000,00			3 Jenis Barang	150.000.000,00
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	195.600.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22 Unit	150.000.000,00
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>		3 Jenis	511.588.352,00			4 Jenis	579.691.000,00
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	48.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Laporan	48.000.000,00
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	28.790.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	31.691.000,00
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	434.798.352,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48 Laporan	500.000.000,00

	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>		1 Jenis	100.000.000,00			6 Jenis	110.000.000,00
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit	110.000.000,00
2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>		3 Persen	4.518.748.210,00			3 Persen	1.700.000.000,00
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Bibit Ternak yang ber SKLB di UPT</i>		20 Ekor	4.518.748.210,00			13.40 Perse n	1.700.000.000,00
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	4.518.748.210,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 laporan	1.700.000.000,00
3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>		12 Persen	3.390.000.000,00			12 Persen	1.500.000.000,00
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)</i>		65 Persen	3.390.000.000,00			22 Persen	1.500.000.000,00
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	3.390.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19 Unit	1.500.000.000,00

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 65.507.254.658,- dan perkiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp. 59.971.889.767,- dengan uraian sebagai berikut :

Pada Renja Tahun 2025, Program Kegiatan Dinas dan UPT lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau anggarannya terpisah. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian di Dinas, anggaran sebesar Rp 6.479.823.760,- pada tahun 2025 dan untuk tahun 2026 sebesar Rp 7.905.000.000,-. Sedangkan UPT Inseminasi Buatan Ternak, anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian tahun 2025 sebesar 2.699.964.252,- dan untuk tahun 2026 sebesar Rp 2.700.000.000,-. Pada UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan, anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian tahun 2025 sebesar Rp. 4.518.748.210,- dan Tahun 2026 sebesar 1.700.000.000,-.

Pagu anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian tahun 2025 sebesar 1.652.843.208,- dan Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Sedangkan di UPT. Inseminasi Buatan Ternak pada program yang sama untuk tahun 2025 anggarannya sebesar 999.999.500,- dan tahun 2026 sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Pada UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan tahun 2025 sebesar Rp. 350.000.000,- dan tahun 2026 sebesar Rp. 790.000.000,- sedangkan di UPT Pengembangan Ternak dan Pakan anggaran pada program ini tahun 2025 sebesar Rp. 3.390.000.000,- dan tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Program Penyuluhan Pertanian direncanakan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.669.998.720,- dan Tahun 2026 sebesar Rp. 2.670.000.000,-. Anggaran Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun 2025 sebesar 5.250.591.960,- dan tahun 2026 sebesar 5.003.519.079,-. Sedangkan di UPT. Laboratorium Veteriner dan klinik Hewan anggaran untuk program ini tahun 2025 dan 2026 sebesar 3.400.000.000,-.

Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp. 30.026.475.146,- dan tahun 2026 sebesar Rp. 28.124.076.776,-. Pada UPT. Inseminasi Buatan Ternak pada program yang sama untuk tahun 2025 anggarannya sebesar 326.995.016,- dan tahun 2026 juga sebesar Rp. 327.000.000,-. Pada UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan tahun 2025 sebesar 2.616.809.290,- dan tahun 2026 sebesar 2.167.007.520,- sedangkan di UPT Pengembangan Ternak dan Pakan anggaran pada program ini tahun 2025 sebesar Rp. 1.125.005.596,- dan tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.185.286.392,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 terdapat 5 (lima) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						46.079.732.794							45.202.595.855	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						46.079.732.794							45.202.595.855	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						46.079.732.794							45.202.595.855	
1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen			100 Persen	30.026.475.146						100 Persen	28.124.076.776	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen			12 Dokumen	149.989.569			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	12 Dokumen	150.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen			4 Dokumen	149.989.569	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	5 Dokumen	150.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	10 Laporan			5 Laporan	23.132.311.767			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	5 Laporan	21.329.620.022	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.940 Orang/ Bulan			1440 Orang/ Bulan	23.132.311.767	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1.500 Orang/ Bulan	21.329.620.022	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	14 Laporan			7 Laporan	249.975.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	7 Laporan	250.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen				1 Dokumen	249.975.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Dokumen	250.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis Layanan				6 Jenis Layanan	1.439.362.746			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	6 Jenis Layanan	1.439.456.754	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket				1 Paket	99.999.499	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Paket	100.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket				2 Paket	329.456.594	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	5 Paket	329.456.754	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket				1 Paket	199.933.700	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	5 Paket	200.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket				1 Paket	159.999.953	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Paket	160.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan				12 Laporan	649.973.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	12 Laporan	650.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis				4 Jenis	3.904.991.064			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	4 Jenis	3.905.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2 Laporan			1 Laporan	4.992.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Laporan	5.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	48 Laporan			12 Laporan	1.099.999.064	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	24 Laporan	1.100.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Laporan			1 Laporan	100.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	3 Laporan	100.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	96 Laporan			12 Laporan	2.700.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	48 Laporan	2.700.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis			6 Jenis	1.149.845.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	6 Jenis	1.050.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	49.930.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Unit	50.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit			19 Unit	749.915.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	16 Unit	750.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			18 Unit	50.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	50 Unit	50.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	150.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1 Unit	100.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	31 Unit			1 Unit	150.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	31 Unit	100.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	3 Persen			3 Persen	6.479.823.760						3 Persen	7.905.000.000	
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	4 Kelompok			2 Kelompok	150.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Sapi Kuantan dan Kerbau Kuntu	4 Kelompok	125.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	2 Laporan			1 Laporan	150.000.000	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, (Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Sapi Kuantan dan Kerbau Kuntu	1 Laporan	125.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	13.396 Ton			3150 Ton	600.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Bank Pakan/Produk si Pakan/Budidaya Sapi Potong, Kambing, Domba	7.492 Ton	600.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	26 laporan			1 laporan	600.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Bank Pakan/Produk si Pakan/Budidaya Sapi Potong, Kambing, Domba	13 laporan	600.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)	13.40 Persen			13.30 Persen	1.950.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	13.40 Persen	1.950.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	6 Laporan			3 Laporan	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	3 Laporan	150.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>	26 laporan			1 laporan	1.800.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	13 laporan	1.800.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	<i>Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)</i>	342 ST			182 ST	3.779.823.760			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	166 ST	5.230.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	10222 Ekor			5.132 Ekor	3.779.823.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	5116 Ekor	5.230.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>	12 Persen			12 Persen	1.652.843.208						12 Persen	1.500.000.000	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)</i>	22 Persen			20 Persen	1.652.843.208			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	22 Persen	1.500.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	<i>Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan</i>	1800 Ha			900 Ha	249.940.104	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, (Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	900 Ha	250.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	<i>Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	8 Unit			6 Unit	952.903.104	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, Kab. Kepulauan Meranti (Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	3 Unit	800.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	<i>Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan</i>	2 Unit			1 Unit	450.000.000	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	1 Unit	450.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
4,	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- <i>Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan</i> - <i>Persentase Angka Kematian Ternak</i>	20 Persen 2,1 Persen			10 Persen 2,15 Persen	5.250.591.960						10 Persen 2,1 Persen	5.003.519.079	

3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)	20 Persen			10 Persen	3.874.127.880			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Ternak Masyarakat	10 Persen	3.753.519.079	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah			12 Wilayah	230.471.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Ternak Masyarakat	12 Wilayah	253.519.079	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72 Laporan			36 Laporan	3.643.656.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Ternak Masyarakat	36 Laporan	3.500.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	90 Persen			90 Persen	976.516.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha	90 Persen	800.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2 Laporan			1 Laporan	99.996.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha	1 Laporan	100.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	120 Laporan			60 Laporan	876.520.000	Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, (Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha	60 Laporan	700.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada penyediaan produk pangan asal hewan segar	29 Wilayah			14 Wilayah	399.948.080			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha Bersertifikasi	15 Wilayah	450.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	74 Laporan			35 Laporan	249.966.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha Bersertifikasi	39 Laporan	300.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

	3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	200 Orang			112 Orang	149.981.768	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Unit Usaha Bersertifikasi	100 Orang	150.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi	15 Persen			15 Persen	2.669.998.720						15 Persen	2.670.000.000	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)	100 Kelompok			50 Kelompok	2.089.493.400			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	50 Kelompok	2.000.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661 Kelompok			661 Kelompok	2.089.493.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak	661 Kelompok	2.000.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	120 Kelompok			60 Kelompok	580.505.320			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak/Gapoktan (Korporasi Peternakan)	60 Kelompok	670.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit			2 Unit	580.505.320	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, (Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	Kelompok Ternak/Gapoktan (Korporasi Peternakan)	1 Unit	670.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK						4.026.958.768							4.027.000.000	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.026.958.768							4.027.000.000	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.026.958.768							4.027.000.000	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen			100 Persen	326.995.016						100 Persen	327.000.000	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis Layanan			1 Jenis Layanan	27.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	6 Jenis Layanan	27.000.000	UPT. Inseminasi Buatan Ternak

	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	27.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	5 Paket	27.000.000	UPT. Inseminasi Buatan Ternak
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis			1 Jenis	299.995.016			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	4 Jenis	300.000.000	UPT. Inseminasi Buatan Ternak
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan			12 Laporan	299.995.016	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	48 Laporan	300.000.000	UPT. Inseminasi Buatan Ternak
2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	3 Persen			3 Persen	2.699.964.252						3 Persen	2.700.000.000	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI	13.396 Ton			62000 Dosis	2.299.998.250			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	7.492 Ton	2.300.000.000	UPT. Inseminasi Buatan Ternak

	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	26 laporan			12 laporan	2.299.998.250	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	13 laporan	2.300.000.000	UPT. Inseminasi Buatan Ternak
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Sapi Bull yang diadakan	342 ST			6 Ekor	399.966.002			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	166 ST	400.000.000	UPT. Inseminasi Buatan Ternak
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	10222 Ekor			6 Ekor	399.966.002	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Inseminasi Buatan Ternak	5116 Ekor	400.000.000	UPT. Inseminasi Buatan Ternak
3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	12 Persen			12 Persen	999.999.500						12 Persen	1.000.000.000	

	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)</i>	22 Persen			76 Persen	999.999.500			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	22 Persen	1.000.000.000	UPT. Inseminasi Buatan Ternak
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	37 Unit			5 Unit	999.999.500	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	19 Unit	1.000.000.000	UPT. Inseminasi Buatan Ternak
		UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN						6.366.809.290							6.357.007.520	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.366.809.290							6.357.007.520	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						6.366.809.290							6.357.007.520	
1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen			100 Persen	2.616.809.290						100 Persen	2.167.007.520	

3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis Layanan			3 Jenis Layanan	678.748.586			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	6 Jenis Layanan	346.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	592.929.086	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	5 Paket	300.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	68.828.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	5 Paket	29.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	16.991.500	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	3 Paket	17.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang				3 Jenis Barang	1.084.597.270			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	3 Jenis Barang	1.000.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit				7 Unit	393.280.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	22 Unit	600.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit				1 Unit	100.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	3 Unit	100.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit				3 Unit	591.317.270	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	5 Unit	300.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis			2 Jenis	469.411.859			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	4 Jenis	461.007.520	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan			1 Laporan	34.990.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	3 Laporan	50.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan			12 Laporan	434.421.859	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	48 Laporan	411.007.520	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis			3 Jenis	384.051.575			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	6 Jenis	360.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			13 Unit	14.950.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	50 Unit	35.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			1 Unit	200.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	3 Unit	200.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit			2 Unit	169.101.575	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	31 Unit	125.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	12 Persen			12 Persen	350.000.000						12 Persen	790.000.000	

	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana UPT</i>	22 Persen			78 Persen	350.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	22 Persen	790.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	<i>Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara</i>	4 Unit			1 Unit	200.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	2 Unit	190.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	37 Unit			1 Unit	150.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	19 Unit	600.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3,	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- <i>Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan</i> - <i>Persentase Angka Kematian Ternak</i>	20 Persen 2,1 Persen			10 Persen 2,15 Persen	3.400.000.000						10 Persen 2,1 Persen	3.400.000.000	

3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)	20 Persen			10 Persen	2.000.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	10 Persen	2.000.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	24 Laporan			12 Laporan	2.000.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	12 Laporan	2.000.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Keswan Kesmavet	29 Wilayah			30 Unit	1.400.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	15 Wilayah	1.400.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	630 Dokumen			300 Dokumen	1.400.000.000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Laboratorium Veteriner & Klinik Hewan	330 Dokumen	1.400.000.000	UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

		UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN						9.033.753.806							4.385.286.392	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						9.033.753.806							4.385.286.392	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						9.033.753.806							4.385.286.392	
1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen			100 Persen	1.125.005.596						100 Persen	1.185.286.392	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis Layanan			3 Jenis Layanan	317.817.244			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	6 Jenis Layanan	345.595.392	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	99.988.944	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	5 Paket	110.000.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan

3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	50.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	5 Paket	50.000.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	167.828.300	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	3 Paket	185.595.392	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang			1 Jenis Barang	195.600.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	3 Jenis Barang	150.000.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit			4 Unit	195.600.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	22 Unit	150.000.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan

3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis			3 Jenis	511.588.352			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	4 Jenis	579.691.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	48.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	24 Laporan	48.000.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan			1 Laporan	28.790.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	3 Laporan	31.691.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan			12 Laporan	434.798.352	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	48 Laporan	500.000.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan

	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis			1 Jenis	100.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	6 Jenis	110.000.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			17 Unit	100.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	50 Unit	110.000.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>	3 Persen			3 Persen	4.518.748.210						3 Persen	1.700.000.000	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit Ternak yang ber SKLB di UPT	13.40 Persen			20 Ekor	4.518.748.210			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	13.40 Persen	1.700.000.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	26 laporan			12 laporan	4.518.748.210	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan	13 laporan	1.700.000.000	UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan

3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sentra Komoditas Pernakan Yang Dikembangkan</i>	12 Persen			12 Persen	3.390.000.000						12 Persen	1.500.000.000	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)</i>	22 Persen			65 Persen	3.390.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	22 Persen	1.500.000.000	UPT. Pengembangan Terak dan Pakan
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	37 Unit			12 Unit	3.390.000.000	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	19 Unit	1.500.000.000	UPT. Pengembangan Terak dan Pakan
	JUMLAH							65.507.254.658								59.971.889.767

BAB. V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 dengan pagu anggaran mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
- 5.2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

- 5.3. Rencana tindak lanjut:

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Riau selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pekanbaru, Juli 2024

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690310199002 1 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pattimura Nomor 2 – Pekanbaru, Kode Pos 28131
Telepon (0761) 44341, Faks (0761) 44342
E-mail : dinaspkh@riau.go.id Website : <https://dispkh.riau.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Nomor : 188 /Kpts/DPKH-SEKR/11/0224

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2024

KEPALA DINAS

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang dan Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 46);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1457/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

14. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts : 7785/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atas nama Tengku T Zul Efendi, SH, M.Si dkk;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188/Kpts/DPKH-SEKR/2024/0071 Tanggal 11 Januari 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi & Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dilingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
 - b. Melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
 - d. Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024;
 - e. Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
 - f. Perumasan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
 - g. Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690301 199002 1 002

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Riau, di Pekanbaru (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Riau, di Pekanbaru;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
Nomor : 188 /Kpts/DPKH-SEKR/II/2024/ 0224
Tanggal : 01 Februari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural / Fungsional
1	Ketua	Drs. H. Masrul Kasmy, M. Si	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Sekretaris	Ayu Susanti, SE	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Sekretariat		
	- Koodinator	Dedy Irawan, SP	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program
	a. Anggota 1	Hamam Ismail, S. Sos, M. Si	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat
	b. Anggota 2	Syed M. Syukri, S. IP	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	c. Anggota 3	Laila Diana, SP, MM	Fungsional Perencanaan Ahli Muda
	d. Anggota 4	Novriati Teza, S. Pt, M. MA	Penelaah Teknis Kebijakan
	e. Anggota 5	Nurkhadijah, S. Pt	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
4	Kelompok Kerja Bidang Produksi Peternakan		
	- Koodinator	Ir. Elly Suryani, M. Si	Kepala Bidang Produksi Peternakan
	a. Anggota 1	H. Elyan Burza, SP, M.Si	Ketua Tim Kerja Pakan Ternak dan Pengembangan Kawasan Peternakan dan Integrasi Ternak Tanaman
	b. Anggota 2	Ummi Qoriah, S. Pt	Ketua Tim Kerja Budidaya Ternak
	c. Anggota 3	Donny Aprizal, S. Pt	Ketua Tim Kerja Perbibitan Ternak
5	Kelompok Kerja Bidang Agribisnis Peternakan		
	- Koordinator	Drs. Heri Afrizon, M. Si	Kepala Bidang Agribisnis Peternakan
	a. Anggota 1	Elfita Sari Nur, S. Pt	Ketua Tim Kerja Pengolahan, Pamasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan
	b. Anggota 2	Eldja Aulia Riza, S. Pi	Ketua Tim Kerja Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan
	c. Anggota 3	Oryza Febrina, S. Pt, M. IP	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan Peternakan
6	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Hewan		
	- Koordinator	drh. Faralinda Sari	Kepala Bidang Kesehatan Hewan
	a. Anggota 1	drh. Revalita Budhiani	Ketua Tim Kerja Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan
	b. Anggota 2	drh. Adriyan Permana Putra	Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
	c. Anggota 3	Salita Syahrial, S. Pt	Ketua Tim Kerja Pengamatan Penyakit Hewan

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural / Fungsional
7	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner		
	- Koordinator	Budhi Iskandar, SE, MBA	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
	a. Anggota 1	Pipi Desvita, S. Pi	Ketua Tim Kerja Higiene Sanitasi
	b. Anggota 2	drh. Ade Rukmantara	Ketua Tim Kerja Pengawasan Keamanan Produk Hewan
	c. Anggota 3	drh. Indahlia Syahfitri Bangun	Ketua Tim Kerja Zoonosis Dan Kesejahteraan Hewan
8	Kelompok Kerja UPT. Inseminasi Buatan Ternak		
	- Koodinator	Mariato Syam, ST	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak
	a. Anggota 1	Erwan Setiawan, SE, MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. IBT
	b. Anggota 2	Mardianto, S. Pt	Kepala Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Pembibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak
	c. Anggota 3	Yeane Sabrina, S. STP	Kepala Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku
9	Kelompok Kerja UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan		
	- Koodinator	drh. Rahmat Setiyawan	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
	a. Anggota 1	Marveni Destiana, S. Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. LVKH
	b. Anggota 2	drh. Dewi Anggreini, MM	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
	c. Anggota 3	drh. Amir Subagya	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Kelompok Kerja UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan		
	- Koordinator	Achmad Danafia, SP	Kepala UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
	a. Anggota 1	Zulkarnain Hasan, S.Si	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT. PTP
	b. Anggota 2	Ekal Hendrayani, S.Pt	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak
	c. Anggota 3	Wan Saiful Effendi, Ap. M. Si	Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690301 199002 1 002

TABEL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	V		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	V		
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	V		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V		
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang		V	- Pada pada sub bab 2.1.1 Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan “berikan penjelasan bahwa kegiatan tersebut tidak memenuhi target”

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan Tabel T-C.29			
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan Tabel T-C.30	V		
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	V		
	2.4 Review terhadap RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Sajikan Tabel T-C.31		V	Pada hal 32 Tabel 2.4 ditambahkan kolom untuk KA (Kawin alami) dan berikan penjelasan pada tabel tersebut.

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; c. Sajikan Tabel T-C.32	V		
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		V	Masukkan Telaahan thd Kebijakan Nasional (jika ada)
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah; 2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.			
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33	V		
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	V		
5	BAB V	PENUTUP			
		Berisikan uraian mengenai :	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.			
6	LAMPIRAN	1. Format pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan renstra perangkat daerah tahun 2025-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan SIPD-RI (Renja 2025) 2. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025	V		

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sekretaris,


AYU SUSANTI, SE
NIP. 19680427 199803 2 001

Pekanbaru, Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappedalitbang Provinsi Riau


ABDUL MADIAN
NIP. 19750516 200212 1 006

Verifikator :


1. RIZKY RACHMAWATI
NIP. 19800331 200903 2 002


2. HENNY DASIIYANTI
NIP. 19820424 201102 2 001